

## H-3 Lebaran, Lalin Jalur Puncak Masih Normal

**BOGOR (IM)**- Pada H-3 menjelang Lebaran, arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor terpantau masih normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan di jalur tersebut. "Situasi arus di Puncak saat ini masih normal. Memang ada peningkatan, namun tidak begitu signifikan. Kemudian memang ada hambatan di Jalur Puncak," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ketut Laswarjana kepada wartawan, Jumat (29/4).

Titik hambatan yang terjadi yakni di sekitar Pasar Cisarua. Karena banyak aktivitas masyarakat di kawasan tersebut sehingga membuat antrean.

"Pasar Cisarua mengingat itu merupakan akses utama masyarakat lokal maupun yang menginap di sekitar Jalur Puncak untuk berbelanja. Hambatan kita di Pasar Cisarua terlihat ada kepadatan. Untuk itu kami menambah personel di lokasi," jelasnya.

Untuk arus pemudik, lanjut

Ketut, mayoritas yang melewati Jalur Puncak yakni motor dengan jarak dekat. Karena, Jalur Puncak bukan jalur utama pemudik tetapi lebih kepada jalur wisata.

"Kita ini kan lebih banyak jalur wisata ya, ada yang mudik tapi tidak terlalu banyak. Pemudik didominasi roda dua. Itu subuh sampai dengan pagi hari tadi sekitar jam 7, saat ini sudah tidak ada lagi. Nanti malam kemungkinan setelah buka itu ada lagi. Kita mengantisipasi subuh dan malam," ungkapnya.

Di samping itu, untuk rekayasa lalu lintas seperti sistem one way akan diberlakukan secara situasional tergantung kondisi lalu lintas di lapangan. Namun, untuk tetap ganjil genap diberlakukan akhir pekan.

"Ganjil genap itu kan sesuai Permenhub Nomor 84. Jadi Jumat-Minggu dan tanggal merah kita laksanakan. Kalau untuk one way masih situasional, melihat arus ramainya yang mana," pungkask Ketut. ● **pra**

## Tujuh Ruas Jalan di Kota Bogor dengan Pembatasan Operasional di Arus Mudik

**BOGOR (IM)**- Dinas Perhubungan Kota Bogor menerbitkan surat edaran (SE) terkait pengaturan dan pembatasan operasional angkutan pada masa angkutan lebaran tahun 2022.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Eko Prabowo melalui Kabid Angkutan RA Mulyadi menunturkan, surat edaran itu merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Angkutan Lebaran 2022.

"Sejak diterbitkannya surat ini, kepada para pengusaha, pemilik maupun operator kendaraan angkutan barang yang masuk atau melintas Kota Bogor pada masa angkutan lebaran tahun 2022 dilakukan pengaturan dan pembatasan operasional," ungkap pejabat Dinas Perhubungan Kota Bogor itu kepada wartawan pada Jumat (29/4).

Mulyadi memaparkan, kendaraan angkutan yang masuk dalam pembatasan operasional adalah mobil barang dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 kilogram, mobil dengan sumbu tiga atau lebih lalu mobil barang dengan kereta tempelan atau mobil barang dengan kereta gandengan, dan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan bahan galian tambang atau bangunan, seperti tanah, pasir dan atau batu.

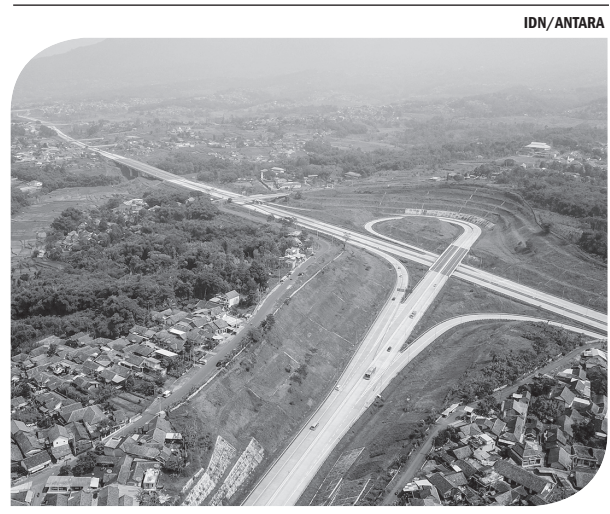
"Pembatasan operasional angkutan barang tersebut yang bakal melalui ruas jalan non tol dengan ketentuan waktu. Arus mudik di ruas jalan non tol atau jalan nasional mulai 28

April 2022 hingga 1 Mei pukul 07.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB. Namun hari libur atau Minggu berlaku 1 Mei 2022 hanya sampai pukul 12.00 WIB," tuturnya.

Mulyadi menjelaskan, arus balik di ruas non tol nanti berlaku mulai tanggal 6 Mei hingga 9 Mei 2022 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB namun pada tanggal 9 Mei 2022 hanya berlaku sampai pukul 12.00 WIB. Itu tidak berlaku bagi kendaraan seperti pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas (BBG).

"Juga bahan ekspor dan impor menuju atau dari dan ke pelabuhan laut, seperti air minum dalam kemasan, ternak, pupuk, hantaran pos dan uang serta bahan-bahan pokok seperti beras, sagu, jagung, gula pasir, sayur dan buah-buahan, daging, ikan, minyak goreng dan margarin, susu, telur, garam serta mobil barang yang diberi tanda khusus untuk mengangkut sepeda motor mudik gratis lebaran," jelasnya.

Mulyadi memaparkan, untuk pembatasan operasional di ruas jalan nasional yang berlaku di Kota Bogor terdapat tujuh ruas jalan, yakni Jalan Raya Wangun, Tajur, Pajajaran, Sholeh Iskandar, KH. Abdullah Bin Nuh, Dramaga dan Jalan KS. Tubun. "Atas terbitnya surat edaran tersebut, saya berharap dapat dijadikan pedoman bagi petugas operasional lapangan. Total petugas gabungan yang terjun ke lapangan 900 personel SeKota Bogor," pungkasknya. ● **gio**



IDN/ANTARA

### ARUS MUDIK DI TOL CISUMDAWU LENGANG

Foto udara kendaraan melintas di Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawau (Cisumdawu) di Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (29/4). Pada arus mudik H-3 Lebaran 2022, kendaraan yang menuju Sumedang di Jalan Tol Cisumdawu terpantau lengang.

## Warga Sukabumi Meninggal Akibat Dianiaya Kawan Bermotor

**SUKABUMI (IM)**- Seorang warga Sukabumi meninggal dunia diduga akibat dianiaya oleh kawan bermotor pada Kamis (28/4) subuh lalu. Keluarga korban berharap para pelaku bisa segera ditangkap.

Sebelumnya, seorang warga Ega Anugrah Putra (29), warga Kampung Ciandam RT 02 RW 06, Kelurahan Cibureum hilir, Kecamatan Cibureum menjadi korban penganiayaan pada Kamis (28/4) subuh. Korban dianiaya dan dibacok di sekitar rel kereta di dekat rumahnya oleh tiga orang pelaku menggunakan satu sepeda motor.

"Kedatangan saya untuk menyampaikan ikut berduka cita dan prihatin atas meninggalnya almarhum kepada keluarga korban," ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi saat mengunjungi rumah duka, Jumat (29/4).

Pada momen tersebut wali kota bertemu dengan istri dan ayah korban didampingi ketua RW dan tokoh masyarakat lainnya. Fahmi mengatakan,

kedatangannya untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada keluarga korban, terutama istri dan keluarga yang ditinggalkan. Di momen itu juga keluarga korban meminta agar pelaku bisa segera ditemukan.

Fahmi mendorong aparat keamanan agar segera menangkap pelaku pembacokan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. "Ke depan mari bersama-sama melakukan kerja sama baik aparat dan masyarakat dalam menghadapi aksi kejahatan," jelasnya.

Sebab, menurut Fahmi, menjaga ketertiban tidak hanya bisa mengandalkan aparat keamanan saja. Butuh gerakan bersama guna mewujudkan suasana kota yang aman dan nyaman. Kapres Sukabumi Kota, AKBP SY Zainal Abidin mengatakan, ada dugaan korban dianiaya oleh beberapa orang dengan menggunakan senjata tajam. Sementara dugaan keterkaitan geng motor, polisi akan melanjutkan dengan proses penyelidikan. ● **pra**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

### PINTU MASUK ONE WAY DIGESER KE GT CIKAMPEK UTAMA

Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan tol Jakarta-Cikampek kilometer 47 dan Jalan Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) di Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/4). Polri menggeser pintu masuk arus lalu lintas satu arah (one way) dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek ke Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) menuju arah timur yang semula dari mulai ruas Tol Jakarta-Cikampek kilometer 47 kini digeser ke Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju Tol Kalikangkung kilometer 414 pada H-3 Lebaran 2022.

### CERMINKAN AROGANSI KPK

## Praktisi Hukum: Penetapan Tersangka Bupati Bogor Terindikasi Pemaksaan

Pengakuan langsung dari Bupati Bogor soal dipaksa bertanggungjawab atas perbuatan anak buahnya, tentunya ini harus dipertimbangkan serius oleh lembaga antirasuah (KPK) sebagai lembaga penegak hukum. Jangan kemudian bersikap arogansi mengingat lembaga ini dipandang istimewa oleh Negara.

**BOGOR (IM)**- Warga Bogor dibuat terkejut atas aksi kedua kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bumi Tegar Beriman. Kali ini, beragam komentar muncul, banyak di antaranya justru bernada negatif mempertanyakan netralitas KPK yang dinilai sarat bermuatan politis, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin.

Praktisi hukum yang juga Managing Director Sembilan

Bintang Law Office, R. Anggi Triana Ismail bahkan menilai, penetapan tersangka terhadap sosok Ade Yasin oleh KPK yang belakangan diketahui terindikasi pemaksaan, mencerminkan arogansi KPK sebagai penegak hukum.

"Pengakuan langsung dari Bupati Bogor soal dipaksa bertanggungjawab atas perbuatan anak buahnya, tentunya ini harus dipertimbangkan serius oleh lembaga antirasuah (KPK) sebagai lembaga pen-

egak hukum. Jangan kemudian bersikap arogansi mengingat lembaga ini dipandang istimewa oleh negara," kata Anggi melalui keterangan persnya, Jumat (29/4).

Anggi lebih lanjut mengatakan, berangkat dari pertanggungjawaban hukum pidana (korupsi), aparat penegak hukum (APH) seringkali mendengar tentang teori hukum pidana yaitu mens rea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) dan actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana).

Anggi menjelaskan, Mens Rea dan Actus Rea di dalam tindak pidana korupsi, sangat penting untuk diperhatikan. Sebab kejahatan yang saat ini dimasukkan ke dalam kategori extra ordinary crime ini, tidak semua dilakukan atas kesadaran atau ada niat.

"Faktanya hari ini tidak sedikit kasus korupsi yang menyeret orang-orang tidak berdosa, dalam hal ini yang

telah melakukan perbuatan pidana yang secara hukum telah memenuhi unsur-unsur yang dikaitkan dengan teori hukum pidana (Mens Rea & Actus Rea, Red).

Apakah ketika seseorang yang berbuat tindak pidana karena ketidaktahuan, yang sebenarnya hal itu dilakukan oleh bawahan atau pihak lain dan yang mana hal itu mungkin bertentangan dengan hati nurani dan tidak ada niat. Apakah hal itu layak untuk dipidana atau dihukum?" tandas Anggi.

Teori hukum pidana tersebut (Mens rea & actus rea), lanjut Anggi, menjadi sangat penting untuk menentukan pertanggungjawaban dari pelaku.

"Perlu diingat bahwa setelah adanya putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tentang korupsi adalah delik materil, artinya unsur memperkaya diri dan merugikan uang negara perlu dibuktikan

secara detail. Apalagi bila ada penangkapan (OTT) di tempat yang berbeda, tentunya KPK perlu berhati-hati dan kecermatan," katanya.

Anggi berharap, KPK sebagai penegak hukum, untuk senantiasa bekerja atas dasar hati nurani, profesionalitas dan semangat anti korupsi.

"Sejatinya jika kita bongkar-bongkar, masih banyak pelaku tindak korupsi yang berkeliranan di muka bumi nusantara yang secara perbuatannya lebih jelas dan tentunya sadis dalam hal merugikan keuangan negara. Namun hal itu, tidak pernah diungkap dan ditindak dengan tegas berdasar hukum," papar Anggi.

"Jangan hanya karena adanya penangkapan Bupati Bogor (AY) yang didesain seperti OTT, KPK kehilangan wibawanya dikarenakan dihujani hujatan baik dari masyarakat umum maupun dari para pakar serta akademisi," pungkasknya. ● **pra**

## Jabar Kembali Usulkan Tiga Calon Daerah Otonomi Baru

**BANDUNG (IM)**- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Ketua DPRD Jabar menandatangani persetujuan usulan tiga Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) dalam rapat paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis petang (28/4).

Ketiga CDPOB tersebut adalah Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara. Dengan telah dipenuhinya syarat administrasi di tingkat provinsi, langkah selanjutnya adalah berkas usulan tiga CDPOB itu akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dikaji.

"Tahapan selanjutnya Pemda Provinsi Jabar akan segera menyampaikan usulan tersebut ke pemerintah pusat," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Emil mengatakan, pemerintah pusat nantinya akan melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan administrasi.

Kemudian hasilnya disampaikan kepada DPR dan DPD RI. "Jika disetujui oleh DPR dan DPD RI, maka pemerintah akan membentuk tim independen," katanya.

Tugas dari tim independen ini, kata Emil, mengkaji persyaratan dasar kapasitas daerah yang terdiri dari tujuh parameter. Antara lain, geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Seperti diketahui saat ini pemerintah pusat masih belum mencabut moratorium pemekaran daerah. Untuk itu, daerah induk diminta agar memanfaatkan momentum tersebut untuk mengoptimalkan kapasitas daerah.

"Sehingga, pada saat moratoriumnya dicabut, pemekaran disetujui oleh pemerintah pusat karena sudah memenuhi semua aspek kelayakan," kata Emil. Saat ini, jumlah kabupaten/ kota di Jabar hanya

27 daerah. Padahal, jumlah penduduknya hampir 50 juta jiwa. Kang Emil mengatakan, jumlah ideal kabupaten/ kota dengan penduduk sebanyak itu adalah 40 daerah.

Emil meyakini, pemekaran daerah akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Selain itu kecepatan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Pun dengan kualitas pelayanan publik yang bisa cepat dan dekat dengan masyarakat. "Tentunya kualitas tata kelola pemerintahan secara umum juga akan meningkat," kata Emil.

Dalam RPJMD Jabar tahun 2018-2023, ditargetkan enam CDPOB diusulkan kepada pemerintah pusat. Adapun CDPOB Kabupaten Cianjur Selatan akan memiliki 14 kecamatan dengan ibu kota Sindangbarang. Kabupaten Tasikmalaya Selatan 10 kecamatan dengan ibu kota Karangnunggal, dan Kabupaten Garut Utara 11 Kecamatan ibu kotanya Cibiuk. ● **pra**



IDN/ANTARA

### MUDIK MENGGUNAKAN BAJAJ

Pemudik yang menggunakan bajaj melintas jalur Pantura Simpang Lohbener, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (29/4). Pemudik menggunakan kendaraan khas ibukota untuk pulang kampung sehingga menjadi perhatian warga daerah karena keunikannya.

## Bima Arya Minta Geng Motor Pembuat Onar Diproses Hukum

**BOGOR (IM)**- Wali Kota Bogor, Bima Arya meminta pihak kepolisian memproses hukum anggota geng motor yang melakukan tindak kriminal di Kota Bogor. Diketahui, aparat dari Polresta Bogor Kota membubarkan aksi konvoi geng motor di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Kamis (28/4) malam. Sebanyak 70 orang diduga anggota geng motor diamankan polisi.

Dari puluhan anggota geng motor yang diamankan itu, sebagian besar masih berusia remaja. Mereka kemudian dikumpulkan di Tugu Kujang dengan dada terbuka. Bima yang datang malam itu nampak geram. "Siapa di sini pentolannya? Ketuanya mana?" tanya Bima sambil bertolak pinggang.

Tidak menemukan jawaban, sejour kemudian Bima memerintahkan remaja itu yang mempunyai KTP untuk berdiri. Kemudian, "siapa ber-KTP Kota Bogor berdiri," tanya Bima Arya dan sebagian besar dari 70 orang itu berdiri. "Kalian tau ya, ada batasan nakal sama kriminal? Kalau yang kriminal proses hukum penjara," tunjuk Bima.

Bima berharap, geng motor pembuat gaduh tidak ada di Kota Bogor. Ia menekankan, Kota Bogor tidak rela hancur oleh

perangai geng motor kriminal. Selanjutnya, Bima Arya meminta pihak kepolisian untuk memproses hukum apabila ada anggota geng motor tersebut positif mengonsumsi narkoba maupun melakukan tindak kriminal lainnya. "Mereka juga untuk dites urine semua. Apabila ada yang terbukti sebagai pengacau dan kriminal harus diproses hukum," tegas Bima.

Diberitakan, polisi menangkap sebanyak 70 anggota geng motor yang menjadi biang keributan di Kota Bogor, Kamis (28/4) malam. Penangkapan geng motor ini berawal dari laporan masyarakat tentang adanya konvoi sepeda motor yang mengganggu dan meresahkan pengguna jalan di ruas jalan Kota Bogor, menjelang buka puasa.

Dalam konvoi tersebut, mereka menggunakan seluruh badan jalan sambil membentangkan atribut geng motor. Akibatnya pengendara lain tidak bisa melintas hingga mengakibatkan kemacetan. Bahkan, sempat terjadi keributan dengan warga di Gang Aut. Puluhan anggota geng motor ini bersal dari beberapa wilayah di Kota dan Kabupaten Bogor. Mereka mengaku konvoi keliling kota untuk merayakan hari ulang tahun XTC. ● **gio**

## Pemkot Bogor Siapkan Lapangan Sempur Jadi Tempat Salat Idul Fitri

**BOGOR (IM)**- Pemkot Bogor, Jawa Barat, bekerja sama dengan sejumlah pihak bakal menyiapkan beberapa tempat untuk gelaran salat Idul Fitri (Id) 1 Syawal 1443 H/2022. Ada 2 tempat yang akan disiapkan untuk salat Id, salah satunya Lapangan Sempur.

"Yang pasti Pemerintah Kota Bogor akan menyiapkan di Lapangan Sempur untuk pimpinan Forkopimda. Kemudian juga di IPB juga dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor. Kemudian ada juga alternatif di Kebun Raya," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim kepada wartawan, Jumat (29/4).

Dedie menjelaskan penyiapan tempat salat Id dilakukan karena Pemkot Bogor telah menjalankan sejumlah langkah dan target, yang ditetapkan pemerin-

tah pusat dalam memutus penyebaran Covid-19. Namun Dedie mengingatkan agar protokol kesehatan tetap harus dipenuhi. "Kota Bogor kan capaian vaksin pertamanya sudah di atas 100%, capaian vaksin boosternya itu 31,5%. Jadi, atas bantuan TNI-Polri, ya kita mempercepat capaian booster. Kita anggaplah sudah relatif aman, tinggal protokol kesehatannya tetap dilaksanakan," sebut Dedie.

Terkait pengamanan salat Id juga tak dilupakan. Dedie menyebutkan ada dinas yang akan melakukan pengamanan bersama pihak TNI-Polri. "Memang ada beberapa dinas yang tidak libur ya, sama dengan polisi, TNI, kementerian, yang memang tujuannya untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kita standby ya sampai akhir masa libur," katanya. ● **gio**